



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2021



**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2022**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

**BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap *stakeholders* atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024.

Laporan Kinerja Biro ini disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2021.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memperbaiki kinerjanya, serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam menyusun program di masa mendatang, sehingga lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Djaka Warsijanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan serta hal yang perlu diperbaiki. Pencapaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan sasaran. Pada tahun 2021 Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hal tersebut, seluruh program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis), Rencana Kerja, serta Penetapan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 sebesar 102,31% dengan 4 (empat) indikator memperoleh capaian dengan kategori “Memuaskan” dan 1 (satu) indikator memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian kinerja dikategorikan “Memuaskan” jika capaian $\geq 100\%$. Sedangkan capaian kinerja didefinisikan “Sangat Baik” jika capaian berada pada rentang capaian $85\% \leq 99\%$. Rincian capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1			
1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%	83,20%	108,05%
Sasaran 2			
1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%
2. Persentase Penyelesaian Penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%	88.61%	93.27%
Sasaran 3			
1. Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet	85%	85,28%	100,33%

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
2. Persentase Kepuasan Unit Kerja Terhadap layanan revisi anggaran	80%	83,34%	104,18%

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya Sistem Aplikasi yang dapat mendeteksi adanya permasalahan dan memantau sejauh mana proses penyusunan program kerja, RAB, dan KAK.
2. Penyampaian program kerja, RAB, dan KAK oleh unit kerja tidak tepat waktu.
3. Kekurangtelitian dalam penyusunan RAB, antara lain ketidakselarasan antara dokumen KAK dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lainnya, RAB belum sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), kesalahan perhitungan pada harga satuan maupun total, kurs dollar yang belum disesuaikan dengan data terkini, dan penggunaan akun belum sesuai dengan peruntukannya.
4. Masih terdapat kendala pada penggunaan aplikasi SAKTI.
5. Aplikasi KRISNA belum terintegrasi secara sempurna dengan aplikasi SAKTI.
6. Regulasi terkait perencanaan mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus.
7. Para pengelola keuangan belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait pelaksanaan anggaran khususnya penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM).
8. Belum adanya sistem informasi yang dapat mengakomodasi pelaporan capaian pelaksanaan anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan. Hal ini berdampak pada verifikasi data capaian yang membutuhkan waktu lebih lama.
9. Perubahan tata cara revisi anggaran serta dilakukannya *refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19.
10. Seringkali dokumen usulan revisi yang diterima unit kerja tidak sesuai dengan format usulan revisi yang seharusnya, sehingga proses revisi anggaran membutuhkan waktu yang lebih lama, karena dokumen usulan revisi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan format yang seharusnya.
11. Narahubung yang melaksanakan pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran pada sebagian besar unit kerja berbeda dengan narahubung yang menyusun perencanaan anggaran, sehingga seringkali terjadi pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran tidak sinkron dengan perencanaan anggaran.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

- 1 Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran.
- 2 Perlu adanya pengembangan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk dapat mengakomodir penginputan capaian kinerja sesuai renja secara periodik setiap bulan, dan diintegrasikan dengan SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu) untuk menghitung capaian kinerja unit kerja secara tersistem sehingga proses penghitungan capaian kinerja anggaran bisa lebih cepat.
- 3 Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan dengan mengomunikasikan alur proses perencanaan, melakukan pendampingan, serta termasuk perlunya ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.
- 4 Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 5 Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator/penanggung jawab/Fasilitasi Operasional anggaran dan pelaksana teknis unit kerja terkait pelaporan pelaksanaan anggaran dan kebijakan revisi anggaran.
- 6 Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan terkait penerapan dan teknis penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- 7 Menginformasikan kepada unit kerja tentang mekanisme pengajuan revisi anggaran beserta dokumen kelengkapan lainnya melalui memorandum sehingga terdapat kesamaan format dokumen pengajuan revisi oleh unit kerja.
- 8 Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan

RINGKASAN EKSEKUTIF

pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.

- 9 Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp781.149.968,- atau 84,48% dari pagu setelah revisi terakhir Rp924.650.000,-. Persentase realisasi anggaran tersebut diiringi dengan capaian kinerja total sebesar 102,31%, capaian kinerja tersebut masuk ke dalam kategori memuaskan. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, Biro Perencanaan dan Keuangan masih dapat melakukan penyerapan anggaran yang baik dengan diiringi capaian kinerja yang memuaskan pada tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja.....	9
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	38
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	6
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	7
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2021	14
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021	15
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021.....	16
Tabel 3.4 Hasil Penilaian Responden pada Sasaran 1 Tahun 2021	18
Tabel 3.5 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2021	21
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2021	23
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2017-2021	24
Tabel 3.8 Penyampaian Laporan Keuangan	25
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2021	26
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2020-2021	27
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021	29
Tabel 3.12 Capaian <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Sasaran 3 Tahun 2021.....	30
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2021	31
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2021	34
Tabel 3.15 Revisi Anggaran Unit Kerja Tahun 2021	36
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2021	38
Tabel 3.17 Sumber Daya Manusia Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017-2021	17
Grafik 3.2 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2017-2021	22
Grafik 3.3 Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2017-2021	32
Grafik 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2017-2021	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	2
Gambar 1.2 Analisis SWOT Biro Perencanaan dan Keuangan.....	4
Gambar 2.1 Visi dan Misi Sekretariat Kabinet.....	6
Gambar 2.2 Tujuan Sekretariat Kabinet Poin 4.....	6
Gambar 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja.....	9
Gambar 3.2 Tangkapan Layar <i>Dashboard</i> SIKT2 2021	15
Gambar 3.3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	18
Gambar 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1.....	31
Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.2.....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai perwujudan upaya penyelenggaraan *good governance*, Pemerintah menerbitkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai entitas akuntabilitas kinerja unit kerja (Eselon II) diwajibkan menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja (Kepala Biro) kepada Pimpinan Unit Organisasi (Deputi). Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Laporan Kinerja (LKj) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 akan dimanfaatkan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang sehingga

PENDAHULUAN

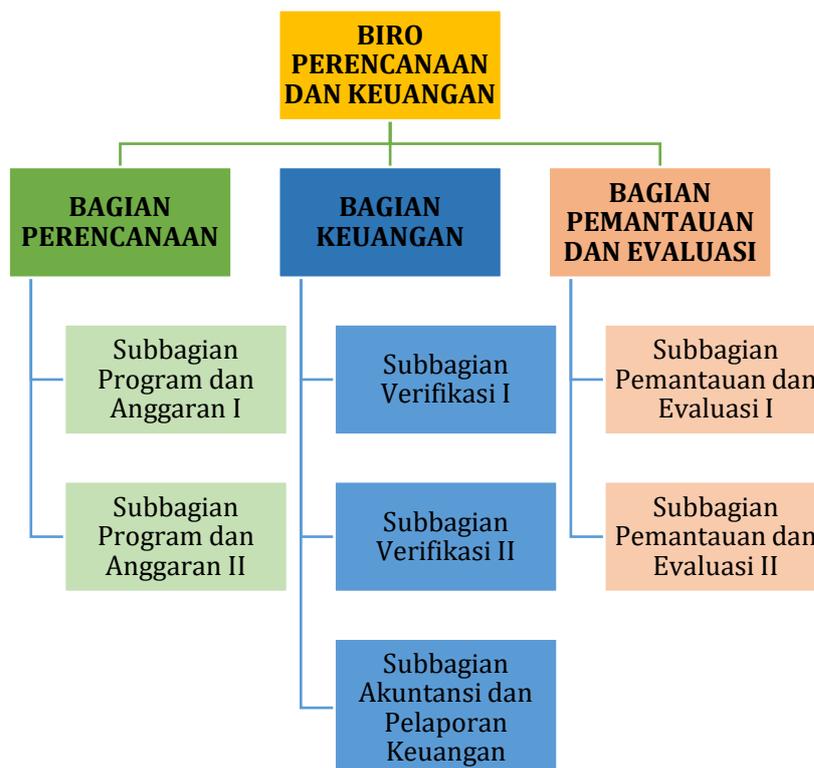
kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan.

B. Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, di tahun 2021 Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri 3 (tiga) bagian, yaitu **Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, dan Bagian Pemantauan dan Evaluasi**.

Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan administratif yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui upaya

PENDAHULUAN

peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet; peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet, dan peningkatan kualitas manajemen keuangan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu Biro Perencanaan dan Keuangan juga sebagai salah satu motor penggerak implementasi SAKIP dimana proses koordinasi penyusunan Rencana Strategis merupakan salah satu tugas pokok dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi, yang memiliki tugas memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

Sebagai unit kerja yang melakukan pengoordinasian penyusunan program dan anggaran serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, sebab Biro Perencanaan dan Keuangan bertanggung jawab terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membuat analisis SWOT. Analisis SWOT berguna untuk mengidentifikasi *uncertainties* (ketidakpastian) yang mungkin terjadi dan mengantisipasi risiko dari ancaman lingkungan eksternal dan kelemahan internal organisasi sehingga organisasi memiliki kesadaran penuh dalam pengambilan keputusan. Identifikasi tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian analisis, yaitu analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan analisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT di bawah ini merupakan cerminan dari kondisi Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet yang dianalisis dengan pendekatan 3 (tiga) unsur, yaitu sumber daya (*input*), proses, dan hasil (*output*).

Gambar 1.2
Analisis SWOT Biro Perencanaan dan Keuangan



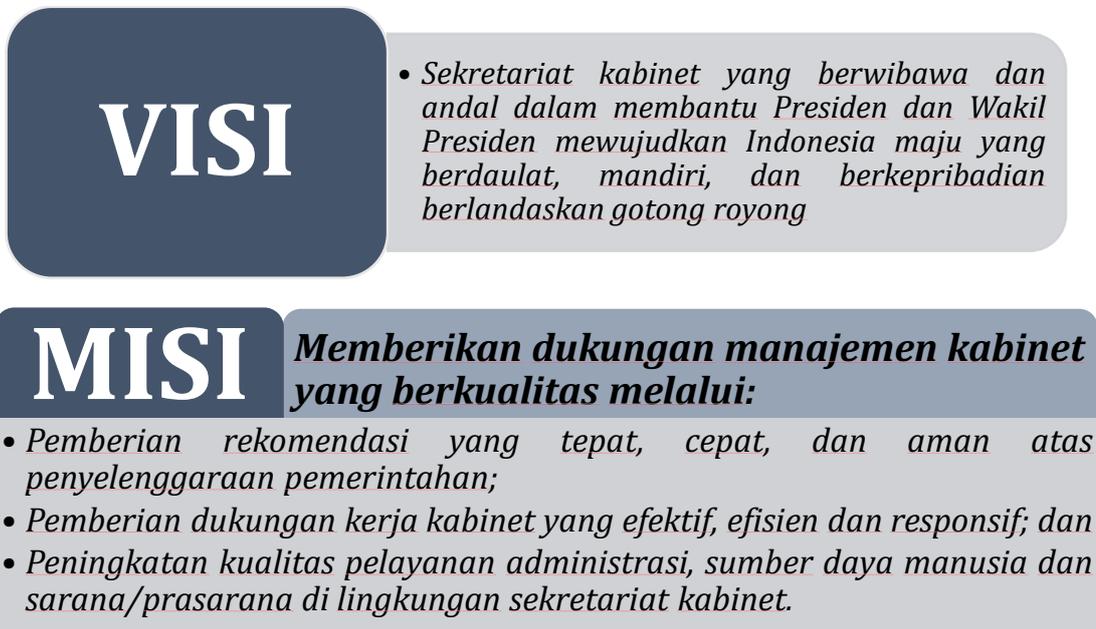
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja dibawah Deputi Bidang Administrasi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Guna mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dengan memperhatikan Rencana Strategis Institusi serta tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet mendukung tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Kabinet seperti yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024, yaitu:

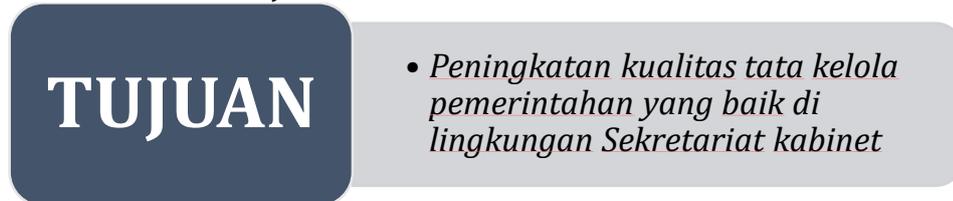
Gambar 2.1
Visi dan Misi Sekretariat Kabinet



Fokus Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung Misi Instansi pada “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet”, yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi segenap pejabat/pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang sudah diamanatkan oleh organisasi. Sebagai mesin penggerak Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mewujudkan visi dan misi tersebut dijabarkan melalui tujuan Sekretariat Kabinet poin 4 yang tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020—2024, yaitu:

Gambar 2.2
Tujuan Sekretariat Kabinet Poin 4



Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan telah selaras dengan sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet yaitu Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet, dengan indikator kinerja yaitu Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet serta Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Penetapan IKU dalam Perseskab Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 dengan IKU baru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

1. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet
2. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat
4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
5. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja juga dilengkapi dengan jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan pencapaian kinerja. Hal ini menandai adanya anggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi, dimana anggaran disusun berdasarkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Sebagai salah satu unit kerja, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada awal tahun dengan penetapan tanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan	1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		2. Persentase penyelesaian penerbitan SPM yang diselesaikan secara akurat	95%
3.	Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi	1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%

PERENCANAAN KINERJA

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80%

Guna mewujudkan kinerja yang sudah diperjanjikan, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh pagu alokasi anggaran awal sebesar Rp1.814.714,00. Untuk penanganan pandemi Covid-19 dilakukan pemotongan alokasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp890.091.000,00 atau sebesar 49,05 persen dari alokasi anggaran awal tahun. Sehingga, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sebesar Rp924.650.000,00 atau sebesar 50,95 persen dari pagu alokasi anggaran awal tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel. LKj Biro Perencanaan dan Keuangan disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam susunan organisasi Sekretariat Kabinet. Peran tersebut direpresentasikan melalui dukungan terhadap 1 (satu) program “**Dukungan Manajemen**” dan 1 (satu) kegiatan yaitu “**Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan**”. Pelayanan Biro mencakup seluruh manajemen/pengelolaan keuangan, dimulai dari proses perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, pelayanan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran, sampai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 dimonitor secara triwulanan dan dilaporkan kepada pimpinan melalui Laporan Capaian Rencana Aksi Penetapan Kinerja Triwulanan. Kategori capaian kinerja yang digunakan pada tahun 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu:

Gambar 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja



AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2021 terdapat pergantian pejabat untuk Kepala Biro Perencanaan dan keuangan. Namun untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan PK 2021 tetap sama yaitu sebagai berikut:

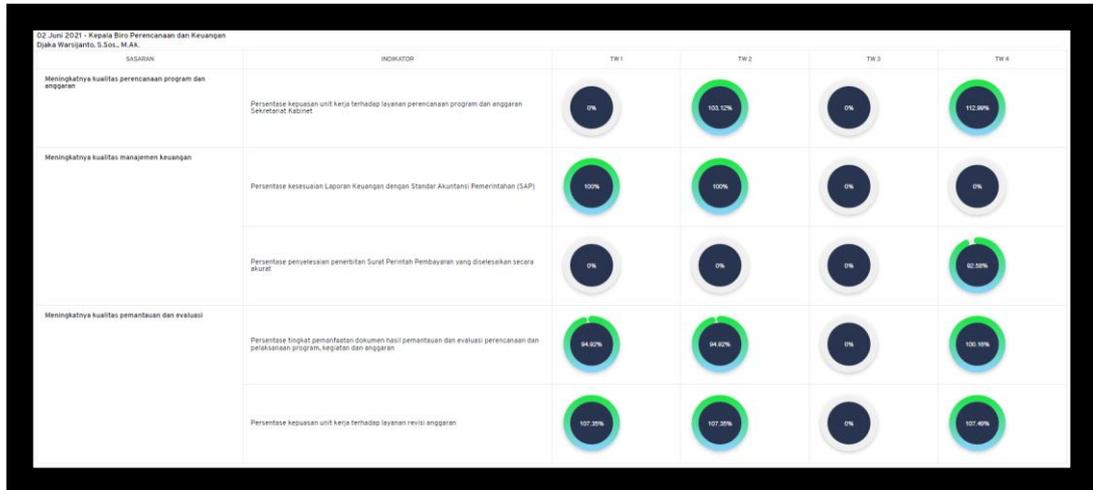
Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2021

TAHUN 2020 (Jan-Sep)		TAHUN 2020 (Okt-Des)		TAHUN 2021	
Indikator	Target	Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	80%	Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%	Persentase tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%
Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	100%	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%
Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%
Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Operasional Kegiatan	80%	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi anggaran	80%

AKUNTABILITAS KINERJA

Bentuk tanggungjawab Biro Perencanaan dan Keuangan atas apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, dilaporkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT2). Tangkapan Layar *dashboard* SIKT2 tahun 2021 sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3.2
Tangkapan Layar *Dashboard* SIKT2 2021



Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan untuk setiap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam PK dapat diuraikan berdasarkan masing-masing sasaran kegiatan.

Sasaran
1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Capaian kinerja pada sasaran 1 diukur melalui 1 (satu) indikator utama, yaitu:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%

AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian mengenai capaian tersebut dapat dilihat dari Tabel Indikator, Target, Realisasi dan Persentase Capaian berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<i>Output:</i>				
1. Renja berdasarkan Pagu Indikatif	Dok	1	1	100%
2. Renja Berdasarkan Pagu Anggaran	Dok	1	1	100%
3. RKA - KL Berdasarkan Pagu Anggaran	Dok	1	1	100%
4. RKA - KL Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran	Dok	1	1	100%
<i>Outcome :</i> Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	%	77	83,20%	108,05%



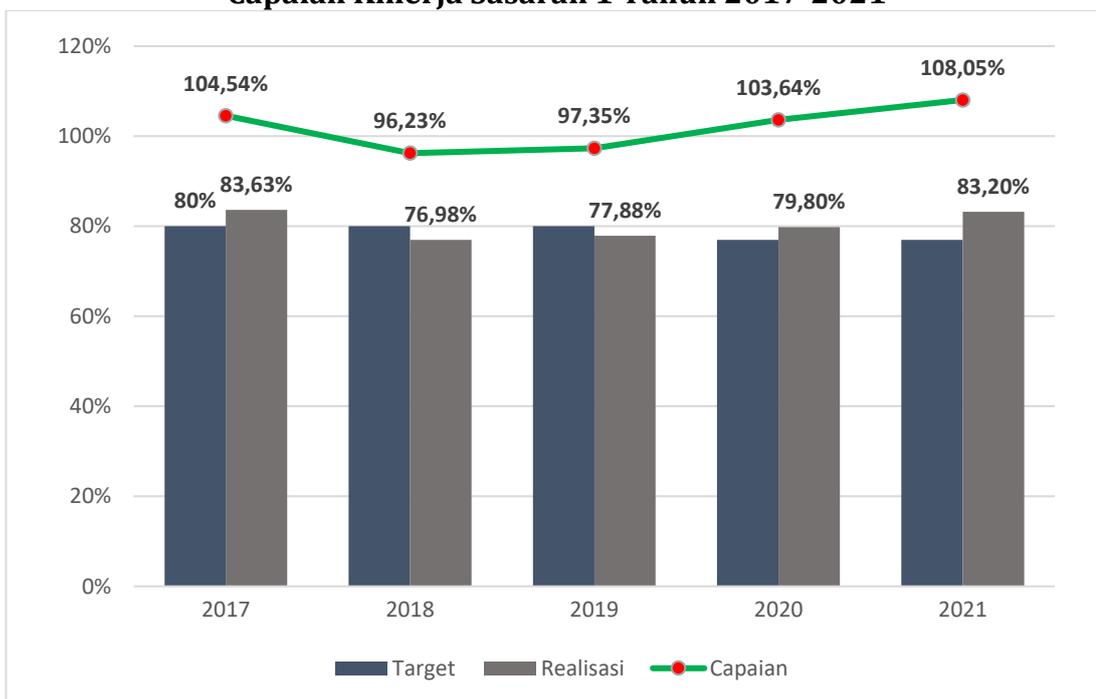
Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Indikator kinerja sasaran 1 adalah “Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet”. Sejak tahun 2014 indikator kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet telah digunakan untuk mengukur kualitas layanan perencanaan program dan anggaran. Grafik berikut ini menggambarkan capaian dari indikator dimaksud sejak tahun 2017 hingga tahun 2021.

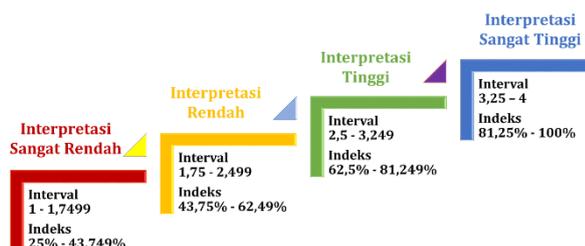
Grafik 3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017-2021



Grafik di atas mencerminkan tren realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1, jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 dan 2020-2024. Berdasarkan data di atas, meskipun sebagian besar capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan, capaian di tahun 2018 dan 2019 belum mencapai target yang ditentukan sampai akhir periode Renstra yaitu 80%. Berdasarkan hal tersebut, maka di tahun 2020 dilakukan penyesuaian target sesuai dengan rata-rata capaian yang diperoleh di tahun 2016-2019. Hal ini menyebabkan target di tahun 2020 dan 2021 berubah menjadi 77% yang dapat tercapai pada 2 tahun terakhir.

Interpretasi indeks atas hasil pengukuran tingkat kepuasan unit kerja terhadap pelayanan penyusunan program dan anggaran Sekretariat Kabinet menggunakan kriteria penilaian berikut ini:

Gambar 3.3
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja



Untuk menghitung tingkat kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2021, dilaksanakan survei 2 (dua) survei pada semester I dan semester II. Survei semester I dilakukan kepada 69 (enam puluh Sembilan) target responden pada tanggal 2 s.d 9 Juli 2021. Sementara survei semester II dilaksanakan pada 31 Desember 2021 s.d 7 Januari 2022 bagi 50 (lima puluh) responden.

Kuesioner tersebut berjumlah 11 (sebelas) pertanyaan terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*); Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*); Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*); Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan Sikap dalam pelayanan (*Empaty*).

Gambaran atas hasil kuesioner dari kedua survei dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil Penilaian Responden pada Sasaran 1 Tahun 2021

Pernyataan	Hasil Survei smt. 1	Hasil Survei smt. 2
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>Responsiveness</i>)		
a. Ketanggapan pegawai terhadap kesulitan unit kerja dalam menyusun perencanaan program dan anggaran.	81,01%	89,33%
b. Ketepatan dan kesigapan pegawai apabila ada kesalahan yang terjadi dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran.	81,51%	88,14%
c. Sikap siap membantu/melayani pegawai dalam membantu unit kerja menyusun perencanaan program dan anggaran.	79,58%	92,42%
Keandalan dalam pelayanan (<i>Reliability</i>)		
a. Pengetahuan pegawai terkait prosedur, dasar hukum, dan sistem penyusunan perencanaan program dan anggaran	80,22%	84,75%
b. Ketepatan waktu penyelesaian penyusunan perencanaan program dan anggaran.	78,08%	85,44%
c. Keakuratan hasil penyusunan perencanaan program dan anggaran.	78,29%	88,83%

AKUNTABILITAS KINERJA

Pernyataan	Hasil Survei smt. 1	Hasil Survei smt. 2
d. Kemampuan pegawai dalam hal penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan penyelesaian perencanaan program dan anggaran.	80,72%	86,75%
Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan (<i>Tangible</i>)		
a. Ketersediaan media/fasilitas (contoh: ruang rapat/akses aplikasi komunikasi/format RAB/KAK dll) dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran.	79,29%	86,44%
b. Sarana yang tersedia untuk menyampaikan saran atau keluhan.	76,50%	85,25%
Kepastian dalam Pelayanan (<i>Assurance</i>)		
a. Kemudahan dalam memperoleh informasi tentang peraturan penyusunan perencanaan program dan anggaran.	80,29%	86,75%
b. Kejelasan prosedur tentang penyusunan perencanaan program dan anggaran.	76,50%	84,56%
c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang proses penyusunan perencanaan program dan anggaran.	78,29%	87,83%
d. Kemudahan dalam mengakses hasil dari penyusunan perencanaan program dan anggaran.	79,72%	86,25%
Sikap dalam Pelayanan (<i>Empathy</i>)		
a. Kemampuan komunikasi pegawai dalam koordinasi terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran dengan unit kerja	81,51%	88,14%
b. Kepedulian pegawai dalam memahami kebutuhan unit kerja dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran.	79,22%	88,33%
c. Bimbingan yang diberikan pegawai dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran.	80,15%	87,94%
Rata-rata	79,40%	87%
Rata-rata Realisasi Smt. 1 dan Smt. 2	83,20%	

Berdasarkan tabulasi penilaian responden terhadap layanan penyusunan program dan anggaran di atas, melalui perhitungan rata-rata semester I dan II didapatkan nilai sebesar **83,20%** atau berada di kategori **“Sangat Tinggi” (81,25 – 100%)**. Adapun target survei pada Rencana Kerja tahun 2021 adalah sebesar 77% sehingga capaian survei pada rata-rata kedua survei tersebut adalah sebesar **108,05%**.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2020, yaitu sebesar 79,80%, maka pada tahun 2021 berdasarkan rata-rata semester I dan II tingkat kepuasan yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar **3,40%**.

Sementara itu, apabila membandingkan penilaian yang dilakukan selama tahun 2021 baik pada survei semester I dan II, dapat dijelaskan bahwa “sikap siap

membantu/melayani pegawai dalam membantu unit kerja menyusun perencanaan program dan anggaran” pada aspek Ketanggapan dalam Pelayanan (*Responsiveness*) memperoleh peningkatan yang signifikan sebesar 12,84%. Sedangkan penilaian terendah dari semester I ke semester II terdapat pada “Pengetahuan pegawai terkait prosedur, dasar hukum, dan sistem penyusunan perencanaan program dan anggaran” dalam aspek Keandalan dalam Pelayanan (*Reliability*) yaitu sebesar 3,74%.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil survei tahun 2021 adalah:

1. Kapasitas/pengetahuan pegawai masih perlu ditingkatkan sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran.
2. Koordinasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan serta dengan unit kerja di Sekretariat Kabinet, perlu lebih ditingkatkan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran di Sekretariat Kabinet dapat berjalan dengan lancar.
3. Penyampaian informasi terkait perencanaan program dan anggaran kepada unit kerja seperti jadwal kegiatan (*time table*), Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan, kebijakan, dll perlu untuk dilakukan secara berkala sehingga terwujud pemahaman yang baik pada unit kerja terkait proses penyusunan dokumen program dan anggaran.
4. Perlu dipertimbangkan adanya standarisasi perencanaan unit kerja agar proses perencanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain masukan diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet, yaitu:

1. Belum adanya Sistem Aplikasi yang dapat mendeteksi adanya permasalahan dan memantau sejauh mana proses penyusunan program kerja, RAB, dan KAK.
2. Penyampaian program kerja, RAB, dan KAK oleh unit kerja tidak tepat waktu.
3. Kekurangtelitian dalam penyusunan RAB, antara lain ketidakselarasan antara dokumen KAK dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan data dukung lainnya, RAB belum sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM), kesalahan perhitungan pada harga satuan maupun total, kurs dollar yang belum disesuaikan dengan data terkini, dan penggunaan akun belum sesuai dengan peruntukannya.
4. Masih terdapat kendala pada penggunaan aplikasi SAKTI.

AKUNTABILITAS KINERJA

5. Aplikasi KRISNA belum terintegrasi secara sempurna dengan aplikasi SAKTI.
6. Regulasi terkait perencanaan mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus.

Berikut ini adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang, sebagai upaya-upaya perbaikan terkait dengan hasil survei yaitu:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait perencanaan program dan anggaran serta meningkatkan koordinasi dengan mitra Kemenkeu dan Bappenas.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada unit kerja melalui para koordinator dan pelaksana teknis.
3. Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum serta penguatan diseminasi melalui koordinasi yang dilakukan dalam bentuk komunikasi informal.

Berikut uraian tentang akuntabilitas keuangan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran”** dilihat dari aspek persentase serapan, penghematan dana maupun efisiensi dan efektifitas penggunaan anggarannya.

Tabel 3.5
Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2021

No	%Realisasi Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
1.	83,20%	Jumlah dokumen perencanaan program: 1. Renja berdasarkan Pagu Indikatif 2. Renja berdasarkan Pagu Anggaran 3. RKA - KL berdasarkan Pagu Anggaran 4. RKA - KL berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran	Output	Dok	4	4
			Input	Rupiah	273.043.000	222.107.694
			Input rata-rata per output	Rupiah	68.260.750	55.526.923
1. Penghematan dana = Rp50.935.306 (0,18%) 2. Efisiensi = Rp12.733.827 per output (0,18%) 3. Efektivitas = % capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)						

Pencapaian sasaran 1 diwujudkan melalui kegiatan Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan dokumen perencanaan program dan

AKUNTABILITAS KINERJA

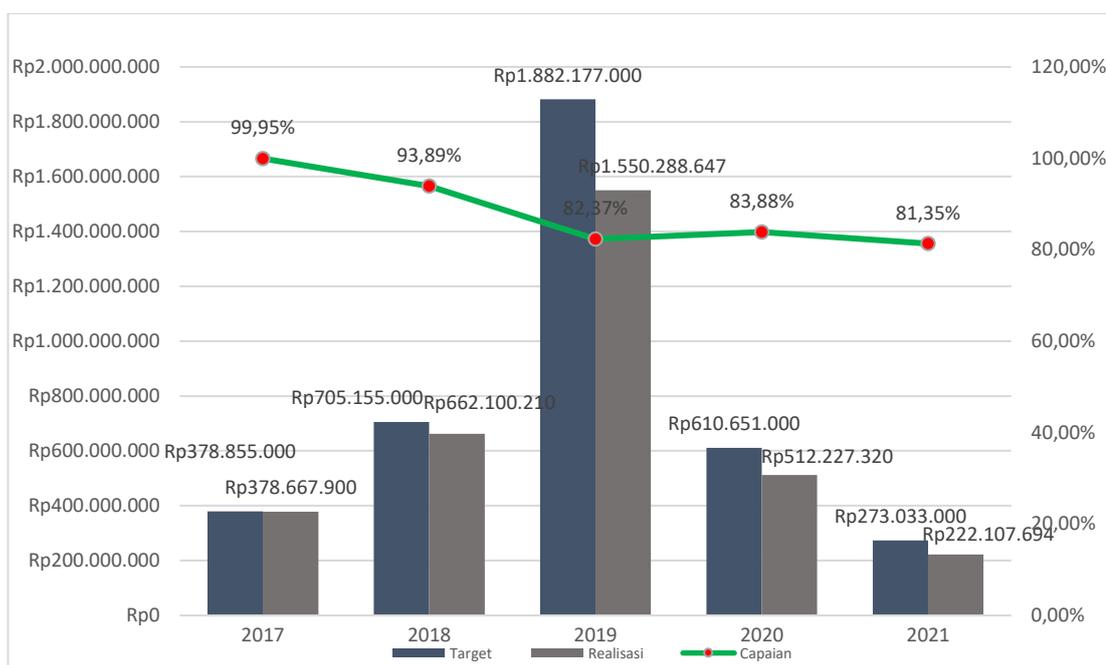
anggaran Sekretariat Kabinet, dan output yang digunakan untuk mengukur efisiensi anggaran dari sasaran ini adalah:

1. Rencana Kerja berdasarkan Pagu Indikatif;
2. Rencana Kerja berdasarkan Pagu Anggaran;
3. RKA-KL berdasarkan Pagu Anggaran; dan
4. RKA-KL berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran.

Proses kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp273.043.000 (pagu revisi) (input) dan terealisasi sebesar Rp222.107.694 atau 81,35% dari rencana pagu anggaran yang telah tersedia. Walaupun realisasi anggaran hanya sebesar 81% namun seluruh output yang ditargetkan dapat tercapai. Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan mengingat masih tingginya angka sebaran Covid-19 dan pembatasan kegiatan dan pergerakan guna menangani pandemi Covid-19.

Adapun perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran 1 sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1
Tahun 2017-2021



Secara umum, capaian kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet**” adalah sebesar 108,05% (Memuaskan), dihitung dari rata-rata realisasi dari tingkat kepuasan unit kerja di semester I dan II sebesar 83,20% dibagi dengan target 77%.

**Sasaran
2**

Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan

2.1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Salah satu fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan adalah penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan. Fungsi tersebut adalah melaksanakan pelayanan dukungan teknis dan administrasi keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Sasaran strategis kedua Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **“Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan”**. Guna menilai pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja sebagai acuan pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Indikator kinerja tersebut adalah:

1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat.

Adapun capaian indikator kinerja selama tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%

Pada tahun 2021, kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ditargetkan sebesar 100%, dan secara keseluruhan target tersebut teralisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PSAP),

AKUNTABILITAS KINERJA

dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet tahun 2020 Nomor: 71A/LHP/XVI/05/2021 dan 71B/LHP/XVI/05/2021 tanggal 20 Mei 2021, BPK memberikan opini bahwa

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Setkab tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran terkait kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan selama lima tahun terakhir (Tahun 2017-2021) dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 2.1 Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun				
	2021	2020	2019	2018	2017
Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, persentase capaian kinerja terkait kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena sistem dan koordinasi penyusunan laporan keuangan yang ada baik internal dan eksternal sudah baik.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan bertanggungjawab untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan. Selain kesesuaian dengan SAP, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada Kementerian Keuangan juga menjadi tolak ukur dalam mendukung pencapaian indikator

AKUNTABILITAS KINERJA

kinerja yang sudah ditetapkan. Adapun selama tahun 2021, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Penyampaian Laporan Keuangan

No.	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Target Waktu	Realisasi Penyampaian	Status
1	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (<i>Unaudited</i>) Tahun 2020	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-2/PB/PB.6/2021, tanggal 22 Januari 2021	19 Februari 2021	15 Februari 2021	Tepat Waktu
2	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet (<i>Audited</i>) Tahun 2020	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-49/PB.6/2021, tanggal 8 April 2021	5 Mei 2021	26 April 2021	Tepat Waktu
3	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2021	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-18/PB/PB.6/2021, tanggal 27 Juli 2021	31 Juli 2021	27 Juli 2021	Tepat Waktu
4	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Triwulan III	Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-234/PB/2021, tanggal 30 September 2021	1 November 2021	26 Oktober 2021	Tepat Waktu

Laporan Keuangan TA 2021 telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Sekretariat Kabinet, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu Satuan Kerja pada pemerintah pusat merupakan entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang memiliki peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara Sekretariat Kabinet selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I selaku Bendahara Umum Negara (BUN) secara periodik yaitu setiap sebulan sekali. Dalam rekonsiliasi tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca yang disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sedangkan Kuasa BUN menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Selain itu telah dilaksanakan pula rekonsiliasi internal untuk membandingkan realisasi anggaran berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) dengan Sistem Informasi Keuangan (SISKA).

2.2.

Persentase Penyelesaian Penerbitan Surat Perintah Membayar yang Diselesaikan Secara Akurat

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%	88.61%	93.27%

Indikator kinerja kedua yaitu “Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat” merupakan salah satu indikator yang ada pada 13 indikator IKPA, dimana nilai IKPA suatu instansi mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanjanya terhadap kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM diproses menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (DSITP), Ditjen Perbendaharaan (DJPb). SPM berlaku sebagai surat perintah kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah untuk mencairkan dana APBN. SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK), disampaikan kepada KPPN oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat dua hari kerja setelah SPM diterbitkan.

AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPM yang diterbitkan tanpa pengembalian dari KPPN}}{\text{Jumlah Total SPM yang terbit}} \times 100\%$$

Selanjutnya, perbandingan target dan capaian kinerja sasaran terkait jumlah persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat pada tahun 2020 - 2021 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran 2.2 Tahun 2020 - 2021

Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan					
Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat					
TAHUN 2020			TAHUN 2021		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
95%	94.81%	99,8%	95%	88.61%	93.27%

Realisasi indikator kinerja “Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat” pada akhir tahun sebesar 88.61% yang diperoleh dengan membandingkan jumlah SPM Akurat sebanyak 1058 SPM dan jumlah SPM yang dikirim KPPN sebanyak 1.194 SPM. Jika membandingkan dengan targetnya, maka persentase capaian kinerja atas indikator kinerja dimaksud adalah sebesar **93.27%**.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan hasil capaian dari tahun 2020 ke tahun 2021. Terkait penurunan capaian persentase kinerja sasaran 2.2 pada tabel 3.10 berikut beberapa hal yang menjadi faktor penyebab penurunan, antara lain:

1. Pengelola keuangan belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait standarisasi uraian SPM;
2. Penggunaan kode akun yang tidak tepat atau salah;
3. Jenis dan sifat pembayaran yang salah;
4. Kelengkapan dokumen pendukung pengajuan SPM belum lengkap;
5. Kesalahan input data supplier dikarenakan adanya perubahan dan/atau penambahan supplier; dan
6. Keterlambatan informasi yang disampaikan oleh KPPN terkait update aplikasi.

Langkah perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan terkait penerapan dan teknis penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang sudah mulai digunakan Bulan Desember 2021. Kedepan diharapkan dengan adanya langkah perbaikan tersebut, kesalahan SPM yang sebelumnya kerap kali terjadi dapat diminimalisasi sehingga tercapainya target kinerja seperti yang diharapkan.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi

Capaian kinerja pada sasaran 3 diukur melalui 2 (dua) indikator utama pada tahun 2021, yaitu:

Indikator Utama 1 Indikator 3.1 dengan Target 85%

- Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

Indikator Utama 2 Indikator 3.2 dengan Target 80%

- Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pengukuran capaian kedua indikator utama dimaksud diukur melalui survei. Survei untuk mengukur capaian kinerja unit-unit kerja di Kedeputan Bidang Administrasi dilaksanakan pada semester I dan semester II kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat kabinet. Survei semester I dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli s.d 9 Juli 2021 secara daring (*online*) dengan 98 responden, sedangkan survei semester II dilaksanakan mulai tanggal 31 Desember 2021 s.d 7 Januari 2022 secara daring (*online*) dengan 126 responden.

Survei terkait pemanfaatan dokumen terbagi menjadi 4 (empat) kategori penilaian, yaitu:

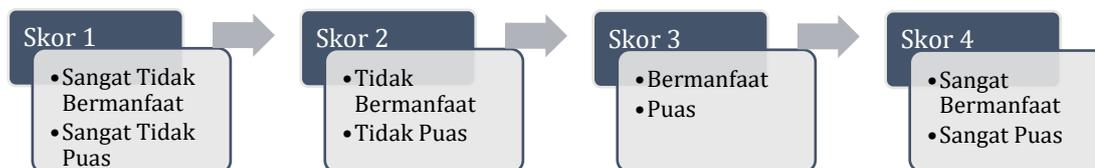
- a. Kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran ditahun mendatang;
- b. Kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam monitoring pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun berjalan;
- c. Kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi; dan
- d. Kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk peningkatan kinerja.

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2021 dilakukan penyederhanaan terhadap kategori survei yang semula berjumlah 4 (empat) kategori menjadi 3 (tiga) kategori. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kategori ke-3 yaitu Kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi dan kategori ke-4 yaitu Kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk peningkatan kinerja mempunyai cakupan yang sama sehingga lebih efektif jika digabungkan menjadi 1 (satu) kategori yaitu Kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk perbaikan/peningkatan kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

Sedangkan survei kepuasan layanan revisi anggaran terbagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu: Ketanggapan dalam pelayanan (*Responsiveness*); Keandalan dalam pelayanan (*Reliability*); Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*); Kepastian dalam pelayanan (*Assurance*); dan Sikap dalam pelayanan (*Empaty*).

Kuesioner dalam survei pemanfaatan dokumen dan kepuasan pelayanan revisi anggaran dimaksud menggunakan 4 (empat) pilihan skala, dengan skor masing-masing jawaban sebagai berikut:



Adapun hasil capaian kinerja sasaran 3 pada kedua indikator sesuai penghitungan berdasarkan hasil survei dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	85,88%	84,68%	85,28%	100,33%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80%	80,68%	85,99%	83,34%	104,18%

AKUNTABILITAS KINERJA

Apabila dirinci secara lebih lanjut, capaian atas sasaran 3 dimaksud merupakan capaian atas outcome dan output sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Output dan Outcome Sasaran 3 Tahun 2021

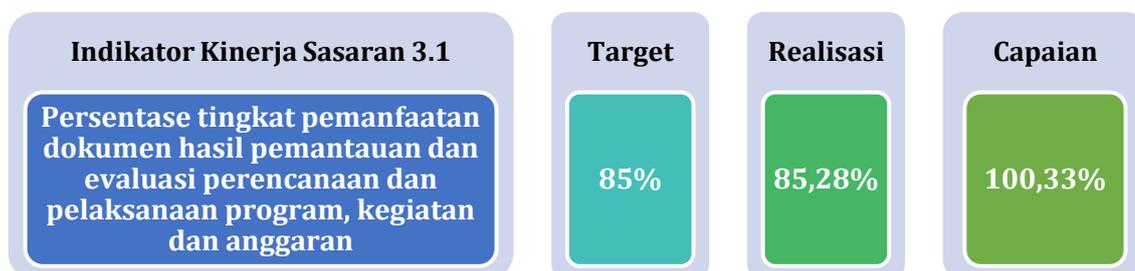
Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
<u>Output:</u>				
1. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2020	Dok	1	1	100%
2. Laporan eMonev Bappenas Tahun 2020	Dok	1	1	100%
3. Laporan SMART Tahun 2020	Dok	1	1	100%
4. Laporan SMART Semester I Tahun 2021	Dok	1	1	100%
5. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2021	Dok	1	1	100%
<u>Outcome:</u>				
1. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	%	85	85,28%	100,33%
2. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	%	80	83,34%	104,18%

3.1.

Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran

Indikator kinerja pertama dari sasaran 3 berupa “Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran” dengan target sebesar 85%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga indikator pertama (sasaran 3.1.) dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.1



Berdasarkan gambar 3.3 dapat diperoleh informasi bahwa realisasi indikator kinerja sasaran 3.1 sebesar 85,28%, jika dibandingkan dengan target sebesar 85%, diperoleh persentase capaian sebesar 100,33%. Adapun rincian capaian sasaran 3.1 berdasarkan hasil survei 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2021

Kategori Pemanfaatan	2020	2021		
		Smt.1	Smt.2	Rata-rata
Kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran ditahun mendatang	81,43%	84,96%	84,29%	84,63%
Kebermanfaatan Laporan/Dokumen dalam monitoring pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun berjalan	81,43%	85,81%	84,63%	85,22%
Kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk perbaikan/peningkatan kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran	81,85%	86,86%	85,14%	86,00%
Rata-rata	81,64%	85,88%	84,68%	85,28%

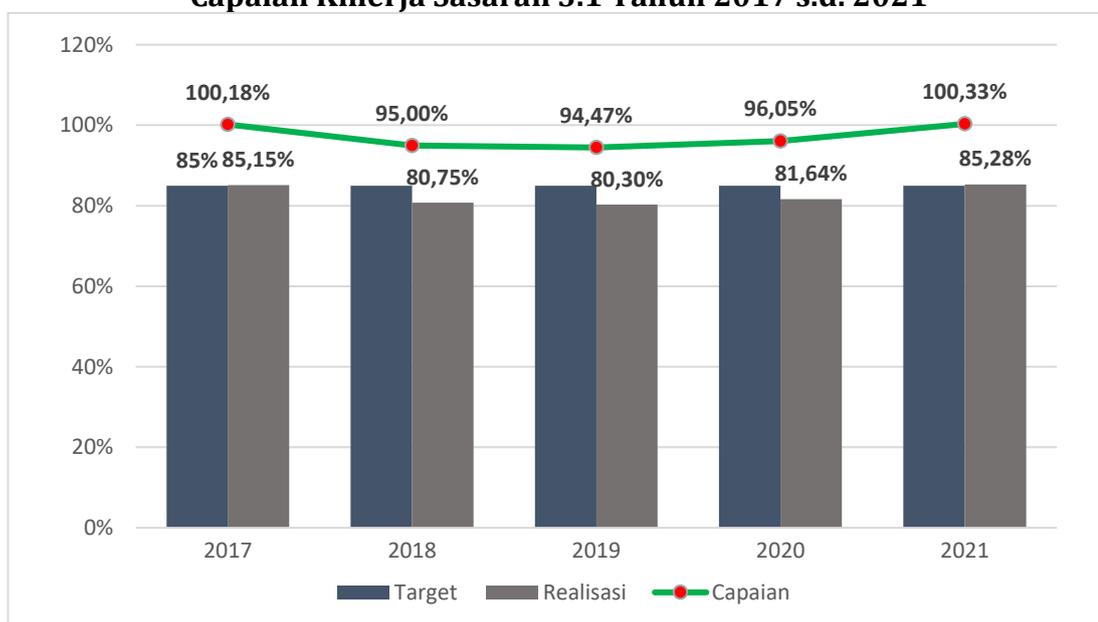
Berdasarkan hasil survey 2021, kategori kebermanfaatan Laporan/Dokumen untuk perbaikan/peningkatan kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran memperoleh indeks tertinggi yaitu sebesar **86,00%**. Sedangkan secara rata-rata indeks pemanfaatan dokumen memperoleh nilai **85,28%** masuk kedalam kriteria interpretasi "**sangat tinggi**". Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2021

AKUNTABILITAS KINERJA

sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi oleh pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Indikator kinerja terkait tingkat pemanfaatan dokumen hasil evaluasi sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2009 s.d. 2021. Namun tentu disesuaikan dengan dinamika organisasi yang mengalami perubahan struktur, tata kerja serta sumber daya manusia. Berikut akan dijabarkan target dan capaian indikator kinerja sasaran 3.1. sejak tahun 2017 s.d. 2021.

Grafik 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 3.1 Tahun 2017 s.d. 2021



Apabila dilihat pada grafik di atas, persentase capaian sasaran 3.1 mengalami tren kenaikan sejak tahun 2019. Jika dibandingkan dengan hasil survei pada Tahun 2020, terdapat kenaikan pada setiap kategori pada hasil survei tahun 2021. Rata-rata nilai indeks tingkat pemanfaatan laporan/dokumen mengalami kenaikan sebesar 3,64%. Terkait peningkatan capaian persentase kinerja sasaran 3.1. yang sebesar 3,64% beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan sebagai faktor pendukung peningkatan, antara lain:

- Meningkatkan frekuensi penerbitan memorandum/laporan evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran yaitu setiap triwulan, sebagai bahan masukan bagi unit kerja untuk meningkatkan kinerja anggarannya ditahun berjalan.
- Meningkatkan kecepatan waktu penerbitan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran.

- c. Memperbaiki tampilan dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran agar lebih menarik dan mudah dipahami dengan menggunakan media infografis.
- d. Selain itu, Renkeu juga selalu menjalin komunikasi yang intensif dengan unit kerja terkait pengumpulan data kinerja anggaran setiap bulannya.

Berdasarkan jawaban responden atas kuesioner pada kolom saran pada survei Januari 2021, diinventarisasi beberapa saran yang membangun dari unit kerja guna perbaikan kinerja sasaran 3.1., antara lain:

- a. Format laporan dibuat dengan lebih informatif dan mudah dipahami.
- b. Melakukan sosialisasi tata cara dan mekanisme pengisian laporan serta sosialisasi laporan evaluasi kepada seluruh unit kerja.
- c. Waktu pengiriman laporan agar lebih cepat agar evaluasi dapat lebih cepat dilakukan.
- d. Terus meningkatkan kinerja dan kerja sama dengan seluruh unit kerja.
- e. Bentuk pelaporan dapat dikembangkan melalui aplikasi online.

Terkait saran tersebut, ditahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Perlu meningkatkan kualitas Laporan/Dokumen dan membuat lebih sederhana, informatif dan mudah dipahami. Laporan/Dokumen dapat disajikan dalam bentuk infografis atau e-book agar lebih menarik.
- b. Penerbitan laporan agar dapat dilaksanakan lebih cepat agar unit kerja dapat melakukan evaluasi. Laporan yang diterbitkan perlu lebih disosialisasikan lagi dengan unit Fasilitasi Operasional (FO).

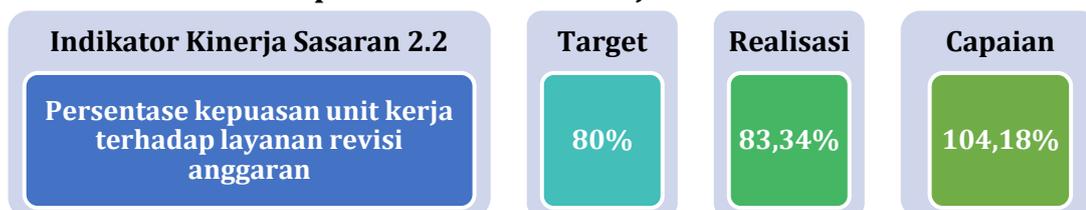
3.2.

Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran

Indikator kinerja kedua dari sasaran 2 yaitu “Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran” dengan target 80%. Adapun target, realisasi dan capaian sasaran ketiga indikator kedua (3.2) dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3.2



AKUNTABILITAS KINERJA

Apabila dirinci capaian sasaran 3.2. berdasarkan hasil survei Semester 1 dan Semester 2 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2021

Pernyataan	Hasil Survei smt. 1	Hasil Survei smt. 2	Rata-rata
Ketanggapan dalam pelayanan (<i>Responsiveness</i>)	81,20%	86,22%	83,71%
a. Ketanggapan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	81,41%	87,02%	
b. Kesigapan dan kecepatan petugas dalam menanggapi pertanyaan/konsultasi terkait layanan revisi anggaran	80,13%	87,50%	
c. Kemudahan prosedur atau alur untuk mendapatkan layanan revisi anggaran	82,05%	84,13%	
Keandalan dalam pelayanan (<i>Reliability</i>)	82,48%	85,58%	84,03%
a. Kemampuan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	85,90%	87,02%	
b. Ketepatan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	79,49%	83,65%	
c. Kecepatan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran. Catatan : sesuai standar layanan, usulan revisi anggaran mulai diproses oleh petugas setelah data dukung lengkap dan benar	82,05%	86,06%	
Kepastian dalam Pelayanan (<i>Assurance</i>)	80,45%	86,06%	83,25%
a. Kepastian dalam memberikan layanan revisi anggaran	80,77%	86,06%	
b. Tanggungjawab petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	80,13%	86,06%	
Sikap dalam Pelayanan (<i>Empathy</i>)	80,77%	88,22%	84,50%
a. Keramahan petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	80,77%	88,94%	
b. Empati petugas dalam memberikan layanan revisi anggaran	80,77%	87,50%	
Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan (<i>Tangible</i>)	78,53%	83,89%	81,21%
a. Ketersediaan media layanan revisi anggaran contoh: media konsultasi via online (wa/telepon/zoom/rapat)	79,94%	84,62%	
b. Ketersediaan format revisi anggaran yang mempermudah proses revisi anggaran	77,56%	83,17%	
Rata-rata	80,68%	85,99%	83,34%

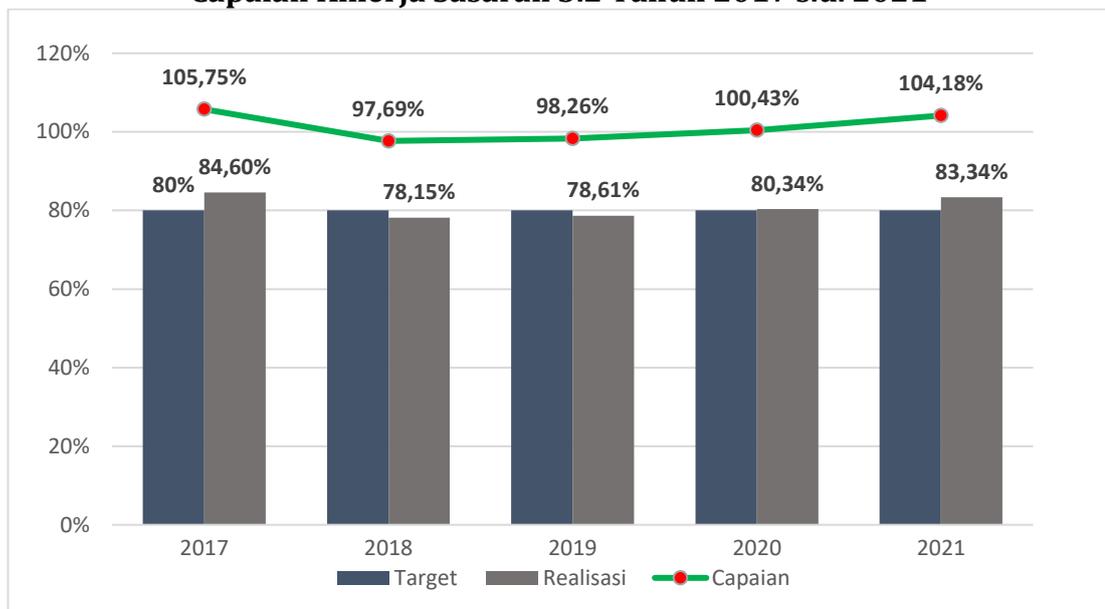
Berdasarkan hasil survey 2021, kategori sikap dalam pelayanan (*emphaty*) memperoleh indeks tertinggi yaitu sebesar 84,50%. Kategori sarana dan

AKUNTABILITAS KINERJA

prasarana dalam pelayanan (*tangible*) memperoleh indeks terendah yaitu sebesar 81,21%, hal ini disebabkan karena media konsultasi yang selama ini digunakan hanya sebatas wa dan telepon. Adapun media komunikasi lain seperti virtual meeting atau rapat tatap muka masih belum difasilitasi dan dimanfaatkan secara optimal. Secara rata-rata indeks kepuasan pelayanan penyusunan revisi anggaran memperoleh nilai **83,34%** masuk kedalam kriteria interpretasi “**sangat tinggi**”. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pelayanan yang diberikan dalam penyusunan dan penyelesaian revisi anggaran tahun 2021 memuaskan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Indikator kinerja terkait kepuasan layanan revisi anggaran sudah digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai indikator kinerja kegiatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berikut akan dijabarkan perbandingan target dan capaian indikator kinerja sasaran 3.2. sejak tahun 2017 s.d. 2021.

Grafik 3.4
Capaian Kinerja Sasaran 3.2 Tahun 2017 s.d. 2021



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan atas layanan revisi anggaran menurun di tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019 hingga tahun 2021, peningkatan sebesar 2,99% terjadi pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Kenaikan capaian persentase kinerja sasaran 3.2. yang sebesar 2,99% bisa dicapai karena adanya beberapa upaya yang telah dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan, antara lain:

- Menerbitkan memorandum Nomor: M.0062/Adm-1/01/2021 perihal Mekanisme Pengajuan Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet, guna memberikan petunjuk yang baku dan jelas terkait mekanisme pengajuan revisi anggaran di Sekretariat Kabinet.

AKUNTABILITAS KINERJA

- b. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja secara intensif, baik melalui media komunikasi seperti memorandum, email, telepon, sms, Whatsapp, maupun melalui penyelenggaraan rapat.
- c. Menyelenggarakan rapat bersama unit kerja segera setelah ditemui adanya permintaan/permasalahan terkait revisi anggaran.
- d. Senantiasa berusaha untuk merespon permintaan dan pertanyaan dari unit kerja dengan sigap dan detail walaupun diluar jam kerja.
- e. Melayani sesuai dengan standard dan tulus.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja kedua pada sasaran tiga pada tahun 2021 telah dilaksanakan revisi anggaran selama 2021 yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Berikut daftar unit kerja dan jumlah revisi anggaran berdasarkan kewenangannya.

Tabel 3.15
Revisi Anggaran Unit Kerja Tahun 2021

Unit Kerja	Kewenangan				Total
	DJA	DJPb		KPA	
		Dit. PA	KANWIL		
AKRB	3		1	7	11
BIRUM	3	1	2	5	11
DKK1	4			6	10
DKK2	4		1	5	10
DKK3	3		1	4	8
DKK4	4			5	9
EKON1	3			3	6
EKON2	3			3	6
EKON3	3			2	5
EKON4	4		1	3	8
INSP	3		1	3	7
Jubir	3			2	5
MARVES1	4			4	8
MARVES2	4		1	1	6
MARVES3	4			4	8
MARVES4	4		1	4	9
PMK1	4			3	7
PMK2	4			2	6
PMK3	4			3	7
PMK4	4		1	2	7
POLHUKAM1	4			4	8
POLHUKAM2	4			4	8
POLHUKAM3	4			2	6
POLHUKAM4	4		1	4	9
PUSBINTER	4			6	10
PUSDATIN		1	1	3	5
RENKEU	3		1	4	8
SDMOT	4		1	5	10

AKUNTABILITAS KINERJA

Unit Kerja	Kewenangan			KPA	Total
	DJA	DJPb			
		Dit. PA	KANWIL		
Sespri	3				3
SETKAB (Pemutakhiran Data & RPD)			2		2
SKP Amin	3			1	4
SKP Angkie	4			7	11
SKP Ari	4			2	6
SKP Arif Budi	3			2	5
SKP Ayu	4			2	6
SKP Billy	3			2	5
SKP Diaz	3			2	5
SKP Dini	3			1	4
SKP Putri	3			1	4
SKP Sukardi	3			1	4
SKWP Arif Rahman	3			4	7
SKWP Bambang	3			1	4
SKWP Imam	3			3	6
SKWP Lukmanul	3			2	5
SKWP Masduki	3			2	5
SKWP Masykuri	3			3	6
SKWP Nasir	3			1	4
SKWP Robikin	3			2	5
SKWP Satya	3			3	6
SKWP Sukri	3			3	6
Total	165	2	16	148	331

* Jumlah revisi termasuk didalamnya dalam rangka penghematan anggaran

Adapun hasil inventarisasi saran berdasarkan hasil survei bulan Januari 2021 terkait permasalahan dalam pencapaian sasaran 3.2. adalah sebagai berikut:

- a. Dibuatkan penjelasan singkat (mis. infografis) mengenai prosedur/alur/mekanisme pengajuan revisi, peraturan rujukan/ketentuan pengajuan revisi, dokumen untuk pengajuan revisi, waktu pengajuan revisi, dan lama proses pengajuan revisi. Dengan demikian, unit kerja memiliki panduan dalam melakukan pengajuan layanan revisi anggaran.
- b. Format revisi anggaran agar dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami.
- c. Membuat wadah untuk menampung usulan dan pertanyaan seputar revisi anggaran dari unit kerja.

Terkait saran tersebut, ditahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Perlu untuk di lakukan sosialisasi secara berkala mengenai alur revisi dan tata cara revisi anggaran di Sekretariat Kabinet. Membuat panduan melalui media

AKUNTABILITAS KINERJA

infografis dan videografis agar mudah dipahami user dan dapat digunakan berulang-ulang apabila terjadi penggantian Person In Charge (PIC) Revisi Anggaran di unit kerja.

- b. Perlu dibuatkan format revisi yang lebih mudah agar proses penyusunan revisi bisa lebih cepat dilaksanakan.
- c. Perlu dibuatkan media sejenis Q&A terkait pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan yang seringkali diajukan oleh pengelola anggaran terkait mekanisme layanan program dan anggaran, termasuk revisi anggaran.

B. Analisis Penggunaan Sumber Daya

1. Realisasi Anggaran

Pagu yang diperjanjikan dalam PK Biro Perencanaan dan Keuangan pada periode tahun 2021 adalah sebesar Rp2.600.000.000,- Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2021

SASARAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	% REALISASI	% CAPAIAN KINERJA*
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Program dan Anggaran					
Sasaran 1	614.741.000	273.043.000	222.107.694	81,35%	108,05%
Meningkatnya Kualitas Manajemen Keuangan					
Sasaran 2	600.000.000	395.500.000	384.385.100	97,19%	96,64%
Meningkatnya Kualitas Pemantauan dan Evaluasi					
Sasaran 3	600.000.000	256.107.000	174.657.174	68,20%	102,26%
TOTAL	1.814.741.000	924.650.000	781.149.968	84,48%	102,31%

*rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp924.650.000,-, sampai dengan 31 Desember 2021 penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah Rp781.149.968,- atau **84,48%**. Capaian anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2021 belum dapat optimal hingga 90% dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun pandemi, sehingga beberapa kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka harus dilakukan secara daring dalam upaya pencegahan penyalbaran virus Covid-19.

Namun demikian, kinerja yang ditargetkan di awal tahun dapat dicapai dengan optimal, dapat dilihat dari capaian kinerja total sebesar **102,31%**. Persentase capaian kinerja total adalah rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian kinerja tersebut masuk ke dalam kategori **memuaskan**. Sehingga dapat

AKUNTABILITAS KINERJA

diinterpretasikan bahwa dalam kondisi pandemi, Biro Perencanaan dan Keuangan masih dapat melakukan penyerapan anggaran yang baik dengan diiringi capaian kinerja yang memuaskan pada tahun 2021.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan. Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2021 (termasuk pegawai tidak tetap) adalah sebanyak 30 orang dengan rincian selama tahun 2019-2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Keuangan

Jabatan	2019	2020 Jan- Sep	2020 Okt-Des	2021 Jan	2021 Feb- Sept	2021 Okt-Des
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	1	1	1	1
Kepala Bagian Perencanaan	1	1	1	1	1	1
Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1	1	1	1
Kepala Bagian Keuangan	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran I	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Program dan Anggaran II	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II	1	1	-	-	-	1
Kepala Subbagian Verifikasi I	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Verifikasi II	1	1	1	1	1	1
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1	1	1	1	1	1
Bendahara Pengeluaran	1	1	1	1	1	1
Analisis Perencanaan	3	1	-	2	2	-
Analisis Keuangan	5	5	5	3	5	5
Analisis Laporan Keuangan	2	2	1	1	1	1
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	2	2	3	3	5	4
Analisis Data dan Informasi	1	1	1	1	2	2
Pengolah Data	4	4	4	2	2	2
Pegawai Tidak Tetap	4	4	4	4	4	4
Jumlah	33	31	29	27	32	30

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Biro Perencanaan dan Keuangan selalu berusaha melaksanakan kinerja secara optimal dengan bantuan sumber daya manusia yang dimiliki. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2021, Biro Perencanaan dan Keuangan menghasilkan rata-rata capaian berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu sebesar **102,31%** dengan kategori **Memuaskan**. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran ini juga telah diimbangi dengan capaian penyerapan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian kinerja. Untuk itu pada tahun mendatang Biro Perencanaan dan Keuangan diharapkan dapat terus menyusun perencanaan anggaran yang komprehensif melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja sehingga dapat dihasilkan penyerapan anggaran yang optimal dan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan adalah:

- 1 Perlu dibangun Sistem Informasi di Sekretariat Kabinet yang terintegrasi terkait perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan anggaran.
- 2 Perlu adanya pengembangan aplikasi SIKT (Sistem Informasi Kinerja Terpadu) untuk dapat mengakomodir penginputan capaian kinerja sesuai rencana secara periodik setiap bulan, dan diintegrasikan dengan SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu) untuk menghitung capaian kinerja unit kerja secara tersistem sehingga proses penghitungan capaian kinerja anggaran bisa lebih cepat.
- 3 Berkoordinasi dengan baik secara internal di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun secara eksternal dengan seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet agar seluruh tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi dilakukan mulai dari tahap perencanaan

PENUTUP

dengan mengomunikasikan alur proses perencanaan, melakukan pendampingan, serta termasuk perlunya ditunjuk satu orang penanggungjawab dari tiap unit kerja untuk menangani pelaporan pelaksanaan anggaran dan revisi anggaran sehingga menjadi satu jalur dan memudahkan untuk monitoring.

- 4 Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya di luar lingkungan Sekretariat Kabinet.
- 5 Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan lebih intensif kepada koordinator/penanggung jawab/Fasilitasi Operasional anggaran dan pelaksana teknis unit kerja terkait pelaporan pelaksanaan anggaran dan kebijakan revisi anggaran.
- 6 Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan terkait penerapan dan teknis penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
- 7 Menginformasikan kepada unit kerja tentang mekanisme pengajuan revisi anggaran beserta dokumen kelengkapan lainnya melalui memorandum sehingga terdapat kesamaan format dokumen pengajuan revisi oleh unit kerja.
- 8 Meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai pada Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengikuti sosialisasi/bimtek terkait agar dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada unit kerja terkait penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, sehingga dapat tepat sasaran dan bermanfaat oleh unit kerja.
- 9 Melakukan penyebarluasan informasi kepada unit kerja melalui Surat Edaran dan Memorandum.

Berbagai upaya perbaikan tersebut memerlukan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam membangun manajemen kinerja yang optimal di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2021


**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua, Deputi Bidang Administrasi  Farid Utomo, S.H., M.H.	Pihak Pertama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
--	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77 Persen
2	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAF)	100 Persen
		Persentase penyelesaian pemberian Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	95 Persen
3	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85 Persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80 Persen

Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	
1. Layanan penyusunan Rencana Kerja K/L	Rp243.768.000,-
2. Layanan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L	Rp370.973.000,-
3. Layanan revisi anggaran	Rp176.421.000,-
4. Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Rp423.579.000,-
5. Laporan keuangan	Rp300.000.000,-
6. Dokumen perbendaharaan	Rp300.000.000,-
Total Anggaran	Rp1.814.741.000,-

Jakarta, 04 Januari 2021

Pihak Kedua, Deputi Bidang Administrasi  Farid Utomo, S.H., M.H.	Pihak Pertama, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
---	---

Lampiran II

MATRIKS CAPAIAN KINERJA 2021

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Kategori Pencapaian
Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	77%	108,05%	Memuaskan
Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	Memuaskan
	Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Membayar yang diselesaikan secara akurat	95%	93.27%	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	85%	100,33%	Memuaskan
	Persentase kepuasan unit kerja terhadap pelayanan revisi anggaran	80%	104,18%	Memuaskan

Lampiran III

MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5=4÷3	6=3-4
Layanan Perencanaan	614.741.000	273.043.000	222.107.694	81,35%	50.935.306
Layanan Manajemen Keuangan	600.000.000	395.500.000	384.385.100	97,19%	11.114.900
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	600.000.000	256.107.000	174.657.174	68,20%	81.449.826
TOTAL	1.814.741.000	924.650.000	781.149.968	84,48%	143.500.032

